

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Aziz, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UMP YKPN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta.
- Kurnia Rahayu, Sri. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lembaran Administrasi Negara – Republik Indonesia. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III)*. Jakarta: LAN.
- Lubis, Hari dan Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Munir, et al. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.

- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco.
- Soemitro, Rochmat dan Kania, Dewi. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rerfika Aditama.
- Suandi, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarjan, Sri Saptalia. 2014. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Asas Keadilan di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Penulisan Hukum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
- Sumyar. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan beserta UU Bea Materai*. Jakarta: Dharma Bakti.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda Administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

### C. Internet

Al Fajri, Fitriyandi. *210.000 Warga Kota Bekasi Nunggak Bayar PBB*. Diakses dari <http://wartakota.tribunnews.com/2015/12/09/breaking-news-210-000-warga-kota-bekasi-nunggak-pbb> pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 10:39

Al Fajri, Fitriyandi. *Ratusan Ribu Wajib Pajak Tunggak Bayar PBB di Bekasi*. Diakses dari <http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/01/ratusan-ribu-wajib-pajak-tunggak-bayar-pbb-di-bekasi> pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 16:42

Azkie, Fathia. *Bekasi Siap Tandingi Harga Properti Jakarta*. Diakses dari <https://www.rumah.com/berita-properti/2017/1/145162/bekasi-siap-tandingi-harga-properti-jakarta> pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 13.20 WIB.

Bachtiar, Yusuf. *Genjot PAD, Pemkot Bekasi Terapkan Lima Strategi Jitu*. Diakses dari <http://jakarta.tribunnews.com/2018/11/30/genjot-pad-pemkot-bekasi-terapkan-lima-strategi-jitu#gref> pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 15:40

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017*. Diakses dari <http://bappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/RKPD-2017-2018.pdf> pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 14:55

Buana, Gana. *Kejar Target PBB, Pemkot Bekasi Hapuskan Denda Piutang*. Diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/187748->

[kejar-target-pbb-pemkot-bekasi-hapus-denda-piutang](#) pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 15:35

Dana, Ferian, *et all.* 2014. *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.* Diakses dari

<https://media.neliti.com/media/publications/192982-ID-efektivitas-intensifikasi-pemungutan-paj.pdf> pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 20:12

Isksndar, Deny. *300 Ribu Warga Belum Bayar PBB, 20 Miliar Belum Tertagih.* Diakses dari

[https://www.indopos.co.id/index.php/read/2016/11/14/697\\_63/300-ribu-warga-belum-bayar-pbb-20-miliar-belum-tertagih](https://www.indopos.co.id/index.php/read/2016/11/14/697_63/300-ribu-warga-belum-bayar-pbb-20-miliar-belum-tertagih) pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 22:49

Sunaryo, Warso. *Bapenda Kota Bekasi Lakukan Verifikasi Penunggak PBB.* Diakses dari <http://www.dakta.com/news/8545/bapenda-kota-bekasi-lakukan-verifikasi-penunggak-pbb> pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 22:51

Tempo. *Mulai Sekarang Warga Bekasi Bayar PBB Bisa Melalui M-Banking.* Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/840205/mulai-sekarang-warga-bekasi-bayar-pbb-bisa-melalui-m-banking/full&view=ok> pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 16:50